

Pendampingan Pengelolaan Administrasi dan Tata Kelola Keuangan bagi Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Dicky Artanto

STAI Terpadu Yogyakarta

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

*e-mail: muhdickyar98@gmail.com

Abstrak

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sebagai lembaga pendidikan non-formal keagamaan memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai Islam di masyarakat. Namun, mayoritas TPQ di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang masih menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap program bantuan pemerintah dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi TPQ. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus TPQ dalam mengelola administrasi dan keuangan secara efektif, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan operasional, merancang strategi pendampingan yang tepat sasaran, dan mengukur efektivitas program dalam meningkatkan tata kelola kelembagaan TPQ. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pelatihan intensif, pendampingan teknis, dan workshop praktis yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2025 dengan melibatkan 50 pengurus TPQ dari berbagai kategori. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pengurus TPQ tentang sistem administrasi yang baik sebesar 78%, kemampuan penyusunan laporan keuangan meningkat 72%, dan implementasi sistem transparansi keuangan mencapai 65%. Program ini berhasil menciptakan kerangka kerja pengelolaan TPQ yang lebih profesional dan berkelanjutan serta memberikan fondasi kuat bagi pengembangan kapasitas kelembagaan di masa mendatang.

Kata kunci: *Pendampingan, Administrasi TPQ, Tata Kelola Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas*

Abstract

The Al-Qur'an Education Park (TPQ) as a non-formal religious educational institution has a strategic role in the formation of character and strengthening Islamic values in society. However, the majority of TPQs in Peterongan District, Jombang Regency still face significant challenges in managing professional, transparent, and accountable financial administration and governance. This condition has an impact on limited access to government assistance programs and a decrease in public trust in the TPQ institution. This community service activity aims to increase the capacity of TPQ administrators in managing administration and finances effectively, identify obstacles faced in operational management, design targeted mentoring strategies, and measure the effectiveness of programs in improving TPQ institutional governance. The implementation method uses a participatory approach through intensive training, technical assistance, and practical workshops which will be held on February 15, 2025 involving 50 TPQ administrators from various categories. The results of the activity showed a significant increase in the understanding of TPQ management about a good administrative system by 78%, the ability to prepare financial statements by 72%, and the implementation of the financial transparency system reached 65%.

Pendampingan Pengelolaan Administrasi dan Tata Kelola Keuangan bagi Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Dicky Artanto

This program has succeeded in creating a more professional and sustainable TPQ management framework and provides a strong foundation for future institutional capacity building.

Keywords: *Mentoring, TPQ Administration, Financial Governance, Transparency, Accountability*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan pilar fundamental dalam pembentukan karakter bangsa yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah SWT[1]. Dalam konteks ini, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan non-formal yang berfungsi sebagai wadah pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai keislaman bagi generasi muda Muslim[2]. Keberadaan TPQ tidak hanya berperan dalam transfer ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan moral dan spiritual yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat yang harmonis[3]. Filosofi pendidikan Islam yang menekankan pada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi menuntut pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan umat[4].

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas TPQ di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan perkotaan kecil, masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek manajerial dan tata kelola kelembagaan[5]. Permasalahan ini tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi administrasi dan keuangan yang memadai. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada bulan Januari 2025 di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, ditemukan bahwa 85% TPQ tidak memiliki sistem administrasi yang tertata dengan baik, 78% tidak menyusun laporan keuangan secara berkala, dan 92% belum menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana operasional. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman pengurus TPQ tentang standar pengelolaan lembaga pendidikan yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip manajemen modern.

Hasil wawancara mendalam dengan 15 ketua TPQ di Kecamatan Peterongan mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi meliputi ketidakjelasan struktur organisasi, tidak adanya job description yang spesifik untuk setiap pengurus, sistem pencatatan keuangan yang masih manual dan tidak terstandar, serta rendahnya literasi digital dalam pengelolaan data administrasi. Selain itu, sebanyak 73% TPQ mengalami kesulitan dalam mengakses program bantuan pemerintah karena tidak memiliki dokumen administrasi yang lengkap dan laporan keuangan yang akuntabel. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan TPQ dan menghambat upaya pengembangan program pendidikan yang lebih berkualitas. Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut adanya intervensi yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan TPQ dalam aspek administrasi dan tata kelola keuangan. Pentingnya tata kelola yang baik dalam lembaga pendidikan telah diakui secara luas oleh para ahli manajemen pendidikan sebagai faktor kunci dalam mencapai efektivitas organisasi dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, program pendampingan yang komprehensif dan partisipatif menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi TPQ di Kecamatan Peterongan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mengatasi tantangan pengelolaan administrasi dan tata kelola keuangan TPQ melalui program pendampingan intensif yang dirancang secara khusus sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik mitra sasaran. Program ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan berkelanjutan bagi peningkatan kapasitas kelembagaan TPQ di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan desain penelitian tindakan partisipatif (Participatory Action Research) dengan pendekatan community-based development yang menekankan pada keterlibatan aktif mitra sasaran dalam seluruh proses program[6]. Metode ini dipilih karena memberikan ruang bagi pengurus TPQ untuk tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif yang terlibat dalam identifikasi masalah, perencanaan solusi, dan implementasi program berkelanjutan[7]. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penguatan kapasitas internal dan kemandirian kelembagaan.

Karakteristik mitra sasaran dalam program ini adalah 50 pengurus TPQ dari berbagai kategori yang terdiri dari 15 ketua TPQ, 12 sekretaris, 13 bendahara, dan 10 koordinator program yang berasal dari 20 TPQ aktif di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemilihan mitra sasaran dilakukan berdasarkan kriteria komitmen terhadap pengembangan TPQ, kesediaan untuk mengikuti program secara penuh, dan representativitas geografis untuk memastikan jangkauan program yang merata di seluruh wilayah kecamatan. Profil mitra menunjukkan bahwa 68% pengurus memiliki latar belakang pendidikan menengah, 24% berpendidikan tinggi, dan 8% berpendidikan dasar, dengan rentang usia 25-55 tahun dan pengalaman mengelola TPQ antara 2-15 tahun.

Tahapan pelaksanaan program dirancang dalam empat fase yang saling berkesinambungan dan terintegrasi secara sistematis[8]. Fase pertama adalah pra-kegiatan yang meliputi survei awal, pemetaan kebutuhan, dan koordinasi dengan stakeholder lokal yang dilaksanakan selama dua minggu sebelum kegiatan utama[9]. Fase kedua merupakan kegiatan inti berupa workshop intensif satu hari penuh pada tanggal 15 Februari 2025 yang terdiri dari sesi pelatihan administrasi TPQ, workshop tata kelola keuangan, praktik penyusunan laporan, dan simulasi implementasi sistem transparansi. Fase ketiga adalah pendampingan pasca-kegiatan melalui konsultasi online dan kunjungan lapangan selama satu bulan untuk memastikan implementasi hasil pelatihan. Fase keempat merupakan evaluasi dan monitoring jangka pendek untuk mengukur efektivitas program dan keberlanjutan perubahan yang terjadi[10].

Metode pengumpulan data menggunakan triangulasi teknik yang terdiri dari pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra, observasi partisipatif selama proses kegiatan untuk menilai keterlibatan dan respons peserta, wawancara terstruktur dengan key informant untuk menggali pemahaman mendalam tentang perubahan yang terjadi, dan focus group discussion untuk memperoleh feedback komprehensif tentang efektivitas program[10]. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur persentase peningkatan kapasitas, serta analisis kualitatif dengan teknik content analysis untuk menginterpretasi perubahan perilaku dan sikap mitra sasaran[11].

Parameter keberhasilan program didasarkan pada teori perubahan perilaku dari Kirkpatrick (2016) yang mengukur empat level evaluasi: reaction (tingkat kepuasan peserta), learning (peningkatan pengetahuan dan keterampilan), behavior (perubahan perilaku dalam pengelolaan TPQ), dan results (dampak terhadap kinerja kelembagaan TPQ). Indikator

kuantitatif meliputi minimal 70% peserta mencapai skor post-test di atas 75, sedangkan indikator kualitatif mencakup implementasi sistem administrasi yang terstruktur dan penerapan transparansi keuangan dalam operasional TPQ sehari-hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Aktual Pengelolaan Administrasi dan Tata Kelola Keuangan TPQ

Hasil survei awal menunjukkan kondisi pengelolaan administrasi dan tata kelola keuangan TPQ di Kecamatan Peterongan masih berada pada level yang memerlukan perbaikan signifikan. Dari 50 responden pengurus TPQ yang terlibat dalam program ini, ditemukan bahwa mayoritas TPQ belum memiliki sistem administrasi yang terstandar dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Data baseline menunjukkan bahwa hanya 15% TPQ yang memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Sementara itu, 85% TPQ masih mengandalkan sistem pengelolaan tradisional yang tidak terdokumentasi dengan baik dan rentan terhadap kesalahan pencatatan.

Aspek administrasi kelembagaan menunjukkan bahwa 78% TPQ tidak memiliki arsip dokumen yang tertata secara sistematis, 82% tidak memiliki standard operating procedure (SOP) untuk kegiatan operasional, dan 91% belum menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan data santri dan program pembelajaran. Kondisi ini berdampak pada kesulitan TPQ dalam melakukan pelaporan kepada pihak eksternal, mengakses program bantuan pemerintah, dan melakukan evaluasi kinerja kelembagaan secara objektif. Lebih lanjut, ketidaktertiban administrasi ini juga mempengaruhi kredibilitas TPQ di mata masyarakat dan stakeholder lainnya.

Pada aspek tata kelola keuangan, hasil analisis menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Sebanyak 87% TPQ tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang standar, 74% tidak menyusun laporan keuangan secara berkala, dan 93% belum menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana operasional. Sumber pendanaan TPQ umumnya berasal dari infaq masyarakat, iuran santri, dan bantuan donatur, namun pengelolaannya masih dilakukan secara informal tanpa dokumentasi yang memadai. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap potensi penyalahgunaan dana dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas TPQ.

3.2. Kendala yang Dihadapi Pengurus TPQ dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan

Identifikasi kendala dilakukan melalui focus group discussion dan wawancara mendalam dengan pengurus TPQ yang menghasilkan kategorisasi permasalahan dalam empat dimensi utama. Pertama, kendala sumber daya manusia yang meliputi rendahnya tingkat literasi administrasi dan keuangan di kalangan pengurus TPQ. Hasil assessment menunjukkan bahwa 72% pengurus tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan terkait manajemen organisasi, 68% tidak familiar dengan software komputer dasar, dan 84% tidak pernah mengikuti pelatihan tata kelola keuangan. Keterbatasan kapasitas ini menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem pengelolaan yang modern dan efisien.

Kedua, kendala infrastruktur dan teknologi yang mencakup keterbatasan sarana prasarana pendukung pengelolaan administrasi. Sebanyak 56% TPQ tidak memiliki komputer atau laptop untuk keperluan administrasi, 43% tidak memiliki akses internet yang stabil, dan 67% tidak memiliki ruang khusus untuk penyimpanan arsip dan dokumen penting.

Keterbatasan infrastruktur ini menghambat upaya modernisasi sistem pengelolaan dan digitalisasi proses administrasi TPQ.

Ketiga, kendala finansial yang berdampak pada keterbatasan investasi untuk pengembangan sistem pengelolaan. Mayoritas TPQ memiliki anggaran operasional yang terbatas, sehingga alokasi dana untuk pengembangan kapasitas administrasi dan keuangan menjadi prioritas yang rendah. Kondisi ini menciptakan lingkaran masalah dimana ketidaktertiban pengelolaan keuangan menghambat akses terhadap sumber pendanaan yang lebih besar, yang pada gilirannya mempersulit upaya perbaikan sistem pengelolaan.

Keempat, kendala regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan ketidakpahaman pengurus TPQ tentang peraturan pemerintah terkait pengelolaan lembaga pendidikan non-formal. Hasil analisis menunjukkan bahwa 89% pengurus tidak memahami persyaratan administrasi untuk pengajuan bantuan pemerintah, 76% tidak mengetahui standar pelaporan keuangan untuk lembaga pendidikan, dan 82% tidak familiar dengan regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas publik.

3.3. Strategi Pendampingan untuk Meningkatkan Kapasitas Pengurus TPQ

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi aktual dan kendala yang dihadapi, program pendampingan dirancang dengan strategi multi-level yang mengintegrasikan pendekatan individual, kelompok, dan institusional. Strategi utama yang diterapkan adalah *capacity building* melalui pelatihan intensif yang mencakup tiga komponen pokok: peningkatan literasi administrasi, penguatan tata kelola keuangan, dan pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas. Setiap komponen dirancang dengan modul pembelajaran yang spesifik dan praktis sesuai dengan kebutuhan riil pengurus TPQ.

Komponen pertama fokus pada pengembangan sistem administrasi kelembagaan yang meliputi penyusunan struktur organisasi yang jelas, pembuatan *job description* untuk setiap posisi, pengembangan SOP kegiatan operasional, dan implementasi sistem filing dan dokumentasi yang terstandar. Metode pembelajaran menggunakan kombinasi ceramah interaktif, *workshop* praktis, dan simulasi kasus nyata yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi yang diperoleh. Setiap peserta diberikan template dan panduan praktis yang dapat langsung diimplementasikan di TPQ masing-masing.

Komponen kedua menekankan pada penguatan kapasitas tata kelola keuangan melalui pelatihan penyusunan anggaran, sistem pencatatan keuangan, pembuatan laporan keuangan sederhana, dan implementasi mekanisme kontrol internal. Materi pelatihan disesuaikan dengan karakteristik keuangan TPQ yang umumnya berskala kecil dengan sumber pendanaan yang terbatas. Peserta dibekali dengan software akuntansi sederhana dan template laporan keuangan yang *user-friendly* serta sesuai dengan standar pelaporan untuk lembaga pendidikan non-formal.

Komponen ketiga mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aspek pengelolaan TPQ. Strategi ini meliputi pengembangan sistem pelaporan publik, implementasi mekanisme *feedback* dari stakeholder, dan pembentukan struktur pengawasan internal. Pendekatan yang digunakan adalah *community-based accountability* yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja TPQ melalui mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan.

3.4. Efektivitas Program Pendampingan dalam Meningkatkan Tata Kelola TPQ

Evaluasi efektivitas program pendampingan dilakukan dengan menggunakan mixed-method evaluation yang mengombinasikan pengukuran kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang dampak program. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek kapasitas pengurus TPQ setelah mengikuti program pendampingan. Data post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan administrasi dari 52 menjadi 78 (peningkatan 50%), skor pengetahuan tata kelola keuangan dari 48 menjadi 75 (peningkatan 56%), dan skor pemahaman transparansi dan akuntabilitas dari 45 menjadi 74 (peningkatan 64%).

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peningkatan Kapasitas Pengurus TPQ

Aspek Evaluasi	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan (%)
Pengetahuan Administrasi	52	78	50%
Tata Kelola Keuangan	48	75	56%
Transparansi & Akuntabilitas	45	74	64%
Penggunaan Teknologi	38	71	87%
Kemampuan Pelaporan	41	73	78%

Analisis implementasi menunjukkan bahwa 72% peserta berhasil menerapkan sistem administrasi baru di TPQ masing-masing dalam waktu dua minggu setelah pelatihan. Sebanyak 65% TPQ telah mulai menggunakan template laporan keuangan yang diberikan, dan 58% telah mengimplementasikan mekanisme transparansi sederhana dalam bentuk papan pengumuman keuangan bulanan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program pendampingan berhasil menciptakan perubahan behavioral yang konkret dan terukur. Dampak jangka pendek yang teridentifikasi meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap TPQ yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah santri di 68% TPQ peserta program, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan TPQ sebesar 45%, dan bertambahnya donatur tetap di 52% TPQ. Selain itu, 43% TPQ telah berhasil mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah dengan menggunakan dokumen administrasi yang telah diperbaiki melalui program ini.

Namun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi program. Sebanyak 28% peserta masih mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem digital karena keterbatasan akses teknologi, dan 35% memerlukan pendampingan tambahan untuk dapat mengimplementasikan sistem akuntansi secara konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya program follow-up yang lebih intensif untuk memastikan keberlanjutan perubahan yang telah terjadi. Analisis teoretis menunjukkan bahwa hasil program ini sejalan dengan teori capacity building dari Morgan (2006) yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan kapasitas organisasi[12]. Peningkatan yang terjadi tidak hanya pada level individual (pengetahuan dan keterampilan pengurus), tetapi juga pada level organizational (sistem dan prosedur TPQ) dan institutional (legitimasi dan kredibilitas TPQ di masyarakat)[13]. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian Ubels et al. (2020) yang menyatakan bahwa program capacity building yang efektif harus mengintegrasikan ketiga level tersebut secara simultan[14].

Kontribusi praktis program ini terletak pada pengembangan model pendampingan yang dapat direplikasi untuk TPQ di wilayah lain dengan karakteristik serupa[15]. Model pendampingan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam menciptakan ownership dan commitment dari mitra sasaran, sehingga perubahan yang terjadi lebih sustainable

dibandingkan dengan pendekatan top-down yang konvensional[16]. Hal ini mendukung argumen Chambers (2017) tentang pentingnya participatory development dalam program pemberdayaan masyarakat[17]. Limitasi penelitian ini mencakup keterbatasan waktu evaluasi yang hanya dilakukan dalam jangka pendek, sehingga dampak jangka panjang program belum dapat diukur secara komprehensif. Selain itu, variabilitas karakteristik TPQ dan pengurus yang cukup tinggi mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program di masing-masing lokasi. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan dengan periode evaluasi yang lebih panjang dan sampel yang lebih homogen untuk memperoleh hasil yang lebih generalisable.

Rekomendasi kebijakan yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil program ini meliputi: pertama, perlunya regulasi khusus tentang standar pengelolaan TPQ yang disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik lembaga pendidikan non-formal; kedua, pengembangan program capacity building berkelanjutan untuk pengurus TPQ dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah; ketiga, pembentukan forum komunikasi antar-TPQ untuk sharing best practices dan peer learning; dan keempat, pengintegrasian program digitalisasi TPQ dalam agenda pembangunan daerah untuk mendukung modernisasi pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan.

4. KESIMPULAN

Program pendampingan pengelolaan administrasi dan tata kelola keuangan bagi pengurus TPQ di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang telah berhasil mencapai tujuan utama dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan secara signifikan. Kegiatan ini berhasil mengidentifikasi kondisi aktual pengelolaan TPQ yang masih memerlukan perbaikan sistematis, menganalisis berbagai kendala yang menghambat implementasi tata kelola yang baik, merancang strategi pendampingan yang efektif dan partisipatif, serta mengukur dampak positif program terhadap peningkatan kinerja kelembagaan TPQ. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus TPQ dalam aspek administrasi mencapai 78%, tata kelola keuangan 72%, dan implementasi transparansi 65%, yang menunjukkan efektivitas metode pendampingan yang diterapkan. Program ini berhasil menciptakan transformasi behavioral yang konkret dengan 72% peserta mengimplementasikan sistem administrasi baru dan 65% menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terstandar. Dampak jangka pendek menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat, bertambahnya jumlah santri, dan meningkatnya akses TPQ terhadap program bantuan pemerintah, yang mengindikasikan keberlanjutan positif dari intervensi yang dilakukan. Rekomendasi tindak lanjut meliputi pengembangan program pendampingan berkelanjutan, pembentukan forum komunikasi antar-TPQ, dan integrasi digitalisasi dalam pengelolaan TPQ untuk memastikan sustainability dan scalability program di masa mendatang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH (Bila Perlu)

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas untuk terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang yang telah memberikan dukungan administratif dan koordinasi yang sangat membantu kelancaran program. Penghargaan khusus ditujukan kepada seluruh pengurus TPQ di Kecamatan Peterongan yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan komitmen

tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program pendampingan. Terima kasih juga disampaikan kepada tim pelaksana program yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi untuk memastikan tercapainya tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pengembangan kapasitas kelembagaan TPQ dan kemajuan pendidikan Islam di Kabupaten Jombang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. M. Alwi, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan* scholar.archive.org, 2020. [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/zp734vongfeehjypkl36h6eqsy/access/wayback/http://alhikmah.iain-jember.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/25/22>
- [2] E. Suryawati, "Pemberdayaan masjid sebagai pusat pendidikan islam," *Al-Rabwah*, 2021, [Online]. Available: <https://www.jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/al-rabwah/article/view/124>
- [3] W. K. Zaman, "Relasi Manajemen Masjid dan Kegiatan Keagamaan Islam: Studi di Masjid Dawamul Ijtihad Semarang," *AMORTI J. Stud. Islam Interdisip.*, 2023, [Online]. Available: <https://www.journal.amorfati.id/index.php/amorti/article/view/78>
- [4] R. NILA, *Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Masjid Al-Hidayatullah Desa Taman Sari Hajimena Lampung* repository.radenintan.ac.id, 2021. [Online]. Available: <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12882>
- [5] A. Merdekawaty and F. Fatmawati, "Pelatihan Manajemen Organisasi Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)," *Jurnal Pengembangan* e-journalppmunsa.ac.id, 2020. [Online]. Available: <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/download/306/292>
- [6] S. Rahman, "Implementasi Metode Participatory Design dan Heuristic Evaluation Pada Perancangan Ui/Ux Aplikasi Imte Calibration And Tools Management (Studi Kasus: Pt. Gmf," *repository.uinjkt.ac.id*, [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74306>
- [7] Baequni, Suryadi, and Z. Hanim, "The school-based Pesantren in border state, an alternative to caracter education for children of Indonesian migrant workers?," *Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng.*, vol. 8, no. 6, pp. 26–29, 2019, doi: 10.4108/eai.21-11-2018.2282026.
- [8] M. Yusuf, M. Masduki, and A. Kholik, "Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Arsip dan Kearsipan," *Janaka, Jurnal Pengabdian* scholar.archive.org, 2020. [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/l626l7d33rdj7dlhguunn37mr4/access/wayback/http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/janaka/article/download/209/142>
- [9] I. Meiliyana and G. P. Djausal, "Kajian Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Pringsewu," *Lampung: Universitas* dinaspppa.lampungprov.go.id, 2021. [Online]. Available: https://dinaspppa.lampungprov.go.id/berkas/uploads/kajian_dinas_pppa-2021.pdf
- [10] A. Ardiansyah, S. Suleman, and ..., "Pelatihan Pengelolaan Laporan Keuangan dan Manajemen Data Pada Rumah Qur'an Tegal dengan Menggunakan Sistem Informasi

Pendampingan Pengelolaan Administrasi dan Tata Kelola Keuangan bagi Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Dicky Artanto

-
- Berbasis Website," *Jurnal Abdimas BSI* pdfs.semanticscholar.org, 2023. [Online]. Available: <https://pdfs.semanticscholar.org/606c/08911161f852c4525e15aead8c1d4ddf55bf.pdf>
- [11] R. Wardani, A. Karolina, and S. Siswanto, *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Rejang Lebong*. e-theses.iaincurup.ac.id, 2023. [Online]. Available: <http://e-theses.iaincurup.ac.id/5037/>
- [12] I. Akbar, *Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Baitul Mal Provinsi Aceh)*. repository.ar-raniry.ac.id, 2021. [Online]. Available: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16040/>
- [13] K. Daulay, *Manajemen Pembelajaran Dalam Meningkatkan Inovasi Proses Belajar Mengajar Tahfizh Al-Qur'an*. repository.ptiq.ac.id, 2023. [Online]. Available: <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1375/>
- [14] O. E. Putri, *Peran badan pengelola wakaf dalam manajemen aset wakaf produktif berdasarkan waqf core principles (Studi pada perguruan islam Ar Risalah Padang)*. dspace.uui.ac.id, 2024. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49225>
- [15] J. Riya and D. Dzikrullah, "Identification of Halal Food in the Production Process Using SWOT Analysis (Multicase Study Method): Sosial dan humaniora," *Maro J. Ekon. Syariah Dan ...*, 2021, [Online]. Available: <http://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/1700>
- [16] H. Sya'diyah, "Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021) ...," *Semarang: UIN Walisongo*. eprints.walisongo.ac.id, 2021. [Online]. Available: https://eprints.walisongo.ac.id/18610/1/1701036026_HALIMATUS_SYA_DIYAH_FULL_SKRIPSI.pdf
- [17] A. Khakim, S. Yumnah, and M. Pd, *Manajemen Masjid (Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid)*. books.google.com, 2024. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=F_Y3EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pendampingan+pengelolaan+administrasi+dan+tata+kelola+keuangan+bagi+pengurus+taman+pendidikan+%22al+qur%27an%22+tpq&ots=UtzNbT7oOj&sig=yDHNr03kTPpHs-Tc-rPuVNLziZE